

MODEL PENUNTASAN WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN¹⁾

Oleh: Darmono²⁾ dan Hiryanto³⁾

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada upaya penuntasan wajar dikdas sembilan tahun dengan menawarkan sebuah model yang mengambil lokasi pada salah satu wilayah kecamatan di suatu kabupaten yang masih termasuk rendah APK-nya yaitu di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kecamatan Karang Intan.

Obyek penelitian ini pada tahun pertama (2007) ini adalah semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, formal maupun non formal yang ada di wilayah Kecamatan Karang Intan, yang meliputi: (1) SD/MI, (2) SMP/MTs, (3) PKBM penyelenggara program Kejar Paket A dan B (pendidikan kesetaraan), (4) Pondok pesantren penyelenggara wajar dikdas sembilan tahun, dan (5) Anak belum/putus sekolah usia pendidikan dasar (umur 6-15 tahun). Indikator penuntasan wajar dikdas di Kecamatan Karang Intan tersebut menarik untuk dilakukan penelitian dengan menawarkan suatu model penuntasan wajar dikdas sembilan tahun.

Hasil penelitian menunjukkan di seluruh wilayah Kecamatan Karang Intan terdapat: (1) 32 SD/MI baik itu negeri maupun swasta, (2) terdapat 4 desa (15,38%) yang tidak memiliki SD/MI, (3) terdapat 8 desa yang memiliki SD/MI lebih dari satu sekolah, dan (4) ada 14 desa yang masing-masing hanya terdapat 1 SD/MI. Untuk sarana pendidikan tingkat SLTP telah terdapat 2 SMP Negeri, 3 SSA Negeri, 1 SMP terbuka, dan 5 buah MTs baik negeri maupun swasta. Selain itu, masih terdapat tambahan dukungan sarana percepatan penuntasan wajar dikdas sembilan tahun yaitu berupa PKBM pelaksana Kejar Paket A dan B sebanyak 6 buah dan Pondok Pesantren Mifthahussibiyah yang berpusat di Desa Mandi Kapau Timur yang telah memiliki unit sebanyak 6 cabang di desa lain. Tiga penyebab utama anak putus/belum sekolah adalah kondisi ekonomi orang tua (60,52%), letak geografis tempat tinggal (18,00%), sosial budaya (9,58%), dan sisanya adalah alasan lainnya. Penyebaran anak yang belum/putus sekolah berdasarkan kelompok umurnya yang terbesar yaitu umur 15 Tahun (54,28%), diikuti umur 14 tahun (18,00%), dan 13 tahun (16,26%). Untuk umur 6 s.d. 12 tahun mempunyai bobot sisanya. Hasil penelitian tahun pertama (2007) ini baru merupakan langkah awal dari penerapan model penelitian yang direncanakan. Oleh sebab itu, agar diperoleh model yang utuh dan untuk melihat sejauhmana efektivitas model yang ditawarkan perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian pada tahun kedua (2008) sebagai penelitian tindakan lapangan.

Kata kunci: wajib belajar, dikdas 9 tahun, dan Kalsel.

¹⁾ Penelitian dibiayai melalui Dana Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2007 Rp 50.000.000,00

²⁾ Dosen Jurusan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

³⁾ Dosen Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

A. PENDAHULUAN

Dalam kerangka pembangunan nasional, mutu sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu modal dasar yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Belajar dari pengalaman negara-negara industri baru (*new emerging industrialized countries*) di Asia Timur, pembangunan suatu bangsa memerlukan *critical mass*, yaitu SDM dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung pembangunan (Anonim, 2006). Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan dan jenis keahlian tertentu untuk memenuhi *critical mass* tersebut.

Harapan dari sektor peningkatan kualitas SDM khususnya melalui jalur pendidikan di atas, ternyata bertolak belakang dengan realitas yang terjadi pada saat ini. Menurut data yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2003), menunjukkan bahwa jumlah anak usia 7-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan masih cukup tinggi sekitar 2,9 juta, angka putus sekolah cukup tinggi (tingkat SD/MI sebanyak 638.056 orang dan untuk SMP/MTs sebanyak 288.787 orang), angka mengulang kelas juga cukup tinggi yaitu tingkat SD/MI sebanyak 1.388.153 orang dan untuk SMP/MTs sebanyak 27.253 orang, serta mutu pendidikan dasar juga masih rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, program pembangunan pendidikan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama diprioritaskan pada penuntasan Program Wajib Belajar (Wajar) Sembilan Tahun yang merupakan salah satu langkah strategis untuk membentuk *critical mass* tersebut. Melalui program tersebut, diharapkan terwujud masyarakat Indonesia yang minimal memiliki kemampuan dasar yang esensial. Kemampuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk menghadapi kehidupan di masyarakat. Dengan bekal kemampuan dasar yang baik, lulusan SMP dan yang sederajat diharapkan mampu memilih pendidikan lanjutan yang sesuai dengan potensi dirinya, mampu

melakukan interaksi dengan masyarakat maupun lingkungan di mana mereka berada, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Wajar Dikdas 9 Tahun bukan semata-mata untuk pencapaian angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi jauh lebih dari itu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu SDM Indonesia sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Oleh karena itu, yang harus dicapai oleh Wajar Dikdas 9 Tahun bukan sekedar tingginya angka partisipasi pendidikan dasar, akan tetapi pendidikan dasar yang bermutu baik.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun semakin mendesak, apalagi jika dikaitkan bahwa sejak 1 Januari 2003 Indonesia telah memasuki era AFTA dan AFLA serta akan disusul dengan APEC pada tahun 2010 (Anonim, 2006). Dalam era keterbukaan itu, Bangsa Indonesia harus siap berkompetisi dengan bangsa lain dalam berbagai bidang kehidupan sehingga penyiapan SDM yang bermutu baik merupakan hal yang sangat penting.

Wajar dikdas sembilan tahun ditujukan bagi anak Indonesia usia 7-15 tahun termasuk anak-anak dari keluarga kurang beruntung, daerah terpencil, daerah pasca konflik, daerah pasca bencana, anak-anak pada pemukiman kumuh, dan anak-anak penyandang cacat dengan memperhatikan kesetaraan gender. Ketika dicanangkan pada tahun 1994, Program Wajar Dikdas 9 Tahun diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun, adanya krisis ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan target tersebut tidak dapat tercapai. Target penuntasan Wajar akhirnya disesuaikan dari 2003/2004 menjadi 2008/2009.

Oleh karenanya, penelitian ini akan menfokuskan pada upaya penuntasan wajar dikdas sembilan tahun yang mengambil pada salah satu wilayah kecamatan di suatu kabupaten yang masih termasuk rendah APK-nya yaitu di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kecamatan Karang Intan yang pada tahun 2006 dimana: (1) APK tingkat SMP termasuk Kejar Paket B hanya 73,3%, (2) APK tingkat

SMP tidak termasuk Kejar Paket B sebesar 51,03%, (3) APM tingkat SMP termasuk Kejar Paket B termasuk hanya 62,00%, dan (4) APK tingkat SMP tidak termasuk Kejar Paket B baru mencapai 41,21%. Nilai-nilai tersebut masih berada bawah nilai rata-rata nasional pada tahun yang sama.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Anak *Drop-Out* Sekolah

Tidak diragukan lagi visi dan misi sekolah adalah untuk memberikan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada anak didiknya melalui proses edukatif dalam rangka membina sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, Biro Pusat Statistik (BPS, 1992) berdasar survei sosial melaporkan penduduk desa yang buta huruf pada usia 5 sampai dengan 29 tahun mencapai 19,17%. Hal ini disebabkan karena angka putus sekolah tingkat SD cukup tinggi. Banyak anak dalam kelompok usia sekolah karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka disebut putus sekolah (*drop-out*). Vembriarto (1977: 13) menerangkan putus sekolah dapat diartikan keluar dari sekolah formal sebelum berhasil menamatkan pelajarannya. Anak (anak) putus sekolah (*drop-out*) adalah bagian dari komunitas anak bangsa dan mereka itu bukanlah merupakan anak kelas dua di negara ini.

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi masalah serius berkaitan dengan masalah putus sekolah. Anak-anak di daerah tertinggal, anak-anak jalanan, anak-anak yang hidup dalam *broken home* adalah contoh dari mereka ini. Beberapa penelitian menjelaskan sebab-sebab *drop-out* antara lain faktor sosial ekonomi. Hasil penelitian Siagian (1988) menyebutkan di daerah perdesaan terdapat 78,6% jumlah penduduk buta huruf yang disebabkan karena sikap negatif terhadap sekolah.

Sikap negatif orang tua terhadap sekolah mempengaruhi terhadap prestasi anak-anaknya. Orang tua memiliki sikap negatif terhadap pendidikan akan menanamkan sikap yang sama pada anaknya. Hal ini akan mengakibatkan semangat belajar menurun, pada gilirannya prestasinya

rendah dan akhirnya *drop-out*. Jika sikap orang tua negatif, mereka mempunyai pengharapan yang tidak realistis terhadap sekolah. Artinya orang tua tidak peduli apa yang dipelajari di sekolah tetapi lebih memikirkan uang yang dihasilkan setelah tamat sekolah. Ivan Illich (1982: 45) menyebut uang lebih berharga daripada ijazah.

Keadaan *drop-out* adalah sesuatu yang tidak diharapkan karena membawa kerugian yang besar bagi anak, orang tua maupun masyarakat. Anak merasakan betapa pahitnya menjadi putus sekolah. Penelitian Wahyudi (1998) mengemukakan, kondisi anak *drop-out* sebagai berikut: (1) Timbul rasa kecewa dan berkembang ke patah semangat karena terpaksa keluar dari sekolah sebelum menamatkan pendidikannya, padahal masih ada kemauan untuk belajar. (2) Dapat menimbulkan kemerosotan moral karena ada kekosongan dalam diri anak, sehingga mudah berperilaku negatif untuk menutupi kelemahannya. (3) Mereka terancam menjadi buta huruf, walaupun mereka berusaha mengembangkan diri melalui latihan-latihan. Dijelaskan selanjutnya bahwa sebagian besar anak *drop-out* berasal dari desa-desa, pegunungan-pegunungan karena mereka segera bertanggung jawab secara sosial sebagai orang dewasa (hidup berumah tangga, ikut serta mencari nafkah). (4) Anak kurang mampu untuk mencapai kedewasaan sehingga kurang siap untuk berkeluarga, kurang pergaulan, dan tidak mandiri.

Ditinjau dari sudut keluarga, kondisi *drop-out* sangat merugikan bagi keluarga. Hasil penelitian Warsito (1999) mengemukakan antara lain: (1) Orang tua merasa kecewa karena anaknya tidak berhasil di bidang pendidikan. (2) *Drop-out* merupakan pemborosan keuangan keluarga walaupun untuk tingkat pendidikan dasar dinyatakan bebas biaya, namun kenyataannya sekolah tidak dapat berjalan tanpa bantuan keuangan dari keluarga. (3) Menambah beban berat keluarga karena anak tidak sekolah dan tidak pula bekerja memerlukan dana untuk menunjang kehidupan.

Masyarakat juga dirugikan karena banyaknya anak *drop-out*. Pertama, kondisi *drop-out* sebagian besar merupakan penyebab kenakalan anak. Kenakalan anak sangat merugikan masyarakat karena menjurus tindak kriminal. Kedua, kondisi *drop-out* menambah banyaknya angka

pengangguran. Karena menganggur biasanya anak mudah terseret ke perilaku negatif/maksiat, misalnya judi, mabuk, menodong, dan sebagainya. Ketiga, kondisi *drop-out* mengurangi partisipasi aktif anak dalam memajukan suatu wilayah/daerah, karena anak merasa minder. Akibatnya pembangunan suatu daerah sangat tertinggal. Apalagi sekarang zaman otonomi daerah (otoda), yang menekankan bahwa kemajuan suatu daerah menjadi tanggung jawab daerah itu sendiri.

2. Tantangan dan Strategi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun

Gambaran umum mengenai pencapaian penuntasan wajar dikdas sembilan tahun hingga tahun 2005, APK SMP/MTs secara nasional telah mencapai 85,22.% dan rata-rata nilai ujian nasional (UNAS) sebesar 6,28 pada tahun pelajaran 2004/2005. Dengan pencapaian tersebut, berarti untuk menuntaskan wajar dikdas sembilan tahun pada tahun 2008/2009 dengan indikator APK SMP/MTs 95% diperlukan kenaikan APK sebesar 9,78%. Kenaikkan APK sebesar 9,78% tersebut dapat dicapai dengan penambahan layanan pendidikan bagi sekitar 1,9 juta anak usia pendidikan dasar yang belum memperoleh layanan pendidikan karena berbagai alasan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Depdiknas, 2006). Oleh karena itu, agar penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang bermutu baik, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan kualitas sehingga lebih dari 70% peserta UAN mencapai nilai rata-rata 6,0 pada tahun 2008/2009. Disamping itu, peningkatan kualitas juga dapat diarahkan agar 70 % sekolah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan benar serta 70% sekolah memberikan layanan pendidikan dan pembelajaran dengan baik, kreatif, dan inovatif.

Untuk mencapai ketuntasan wajar dikdas 9 tahun dengan indikator APK SMP/MTs 95% dan 70% peserta UAN meraih nilai rata-rata 6.00, perlu disusun strategi, pentahapan, dan program penuntasan yang tepat dengan didasarkan pada kondisi obyektif pendidikan SMP saat ini,

tantangan-tantangan atau kendala-kendala lapangan yang dihadapi, dan potensi atau sumber daya yang tersedia.

Secara nasional sejumlah tantangan utama untuk penuntasan wajar dikdas sembilan tahun antara lain adalah sebagai berikut: (1) masih ada 1,9 juta anak usia 13-15 tahun belum tertampung, (2) APK SMP dari 118 kabupaten di bawah 75 %, (3) kondisi geografis yang sulit, (4) kemiskinan, (5) kesenjangan budaya dan kesetaraan gender, (6) peran pemda belum optimal, (7) peran perguruan tinggi perlu dioptimalkan, dan (8) sarana dan prasarana pendidikan kurang memadai.

3. Strategi Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun

Memperhatikan target penuntasan wajar dikdas sembilan Tahun yang bermutu dan berbagai tantangan sebagaimana dikemukakan di atas terdapat beberapa tiga program yang selayaknya dilakukan, yaitu: perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan peningkatan mutu governance, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam pengelolaan pendidikan (Depdiknas, 2006).

Secara garis besar ketiga program tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut: (1) Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP, (2) Pembangunan Ruang Kelas Baru, (3) Subsidi Siswa, (4) Pembangunan SD-SMP Satu Atap, (5) SMP Terbuka, dan (6) Sosialisasi dan Kerjasama Penuntasan Wajib Belajar.

4. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun Melalui Pondok Pesantren

Persoalan pendidikan di Indonesia tidak semudah yang dialami oleh negara-negara kecil di Asia. Permasalahan pendidikan di Indonesia sangat kompleks, artinya permasalahan pendidikan saling berkait dengan sistem kenegaraan (politis) yang dipicu oleh kondisi historis dan geografis. Kondisi ini menyebabkan sistem pemerintahan relatif berkembang secara instabilitas terhadap bentuk, pola maupun sistem dalam berkehidupan bernegara dan berbangsa. Persoalan politis yang berpengaruh kepada pengembangan

pendidikan di Indonesia sekarang ini dirasakan pada sistem manajemen pendidikan. Tercatat, manajemen yang paling mula dalam konteks perkembangan pendidikan di Indonesia adalah pondok pesantren. Bentuk manajemen pondok ini hadir seiring dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bersifat paternalistik. Artinya, manajemen pendidikan yang mengacu kepada pemimpin lembaga/institusi pondok; seperti halnya raja sebagai *patronage* dan sekaligus rujukan oleh bawahannya (Hajar Pamadhi, 2005).

Manajemen pondok merupakan akumulasi pola pembelajaran agama Islam dengan keterampilan teknis, dan mengangkat kyai sebagai *patronage* (rujukan) institusi. Oleh karenanya, kyai merupakan sumber dan pusat ilmu, segala putusan untuk hidup. Indikasi tersebut belum diketemukan sejarah yang tepat tentang alur sistem manajemen pondok yang berasal dari India (Hindu dan Budha) ataupun dari negeri sendiri. Namun, berdasarkan penuturan beberapa ahli (dugaan para ahli) manajemen santri atau pondok pesantren adalah olah pikir dari para Ustadz ketika berkembangnya kerajaan (Depag RI, 2003: 7).

Manajemen pondok merupakan manajemen pendidikan tradisional yang membentuk santri (siswa) berkepribadian menyeluruh antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Inti pembelajaran berupa: (1) penanaman kepribadian melalui pelajaran agama Islam (fiqih, tauhid, dan seterusnya), dan (2) keterampilan (*academic dan life skill*) yang terpadu (*integrated curriculum*) melalui pelajaran persiapan hidup untuk bekerja sesuai dengan profesi (belajar ilmu umum seperti sekolah pada umumnya). Pendidikan pondok telah mengenal belajar sepanjang hayat (*life long education*) yang diterapkan pendidikan itu dimulai sejak bangun tidur di pagi hari ketika membuka mata sampai mata telah tidak mampu lagi mengamati sekelilingnya. Pendidikan sepanjang masa diperkenalkan secara polos oleh para kyai tanpa mengenal lelah, dan dipolakan mulai dari cara bergaul bersosial sampai kehidupan

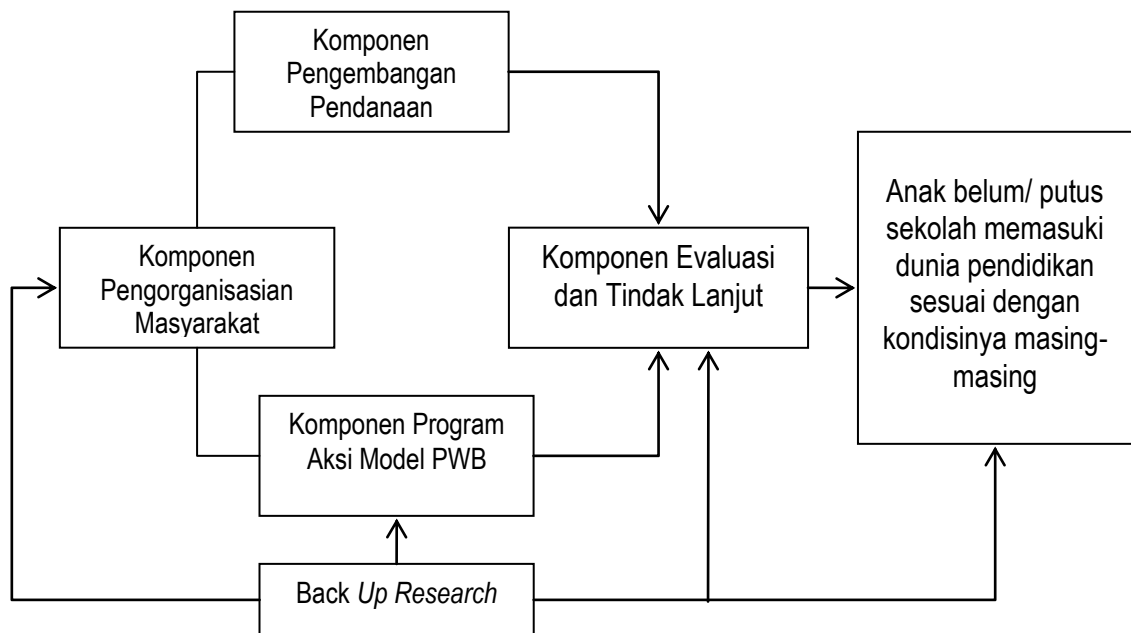
beragama. Dengan kata lain, pendidikan di pondok dapat memperkenalkan pendidikan fungsional sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang muncul pada manajemen pendidikan bergaya *patronage* atau paternalistik ini adalah ketergantungan dengan patronnya. Ketika dunia telah berubah dan pengetahuan telah melebar, beberapa pandangan tradisional dalam pondok sulit untuk dikembangkan karena ketergantungan dengan patron tersebut. Oleh sebab itu, objek sasar pada kelas *patronage* dapat diubah dengan pendekatan sosiokultural, memasukkan reformasi ke dalam alur berpikir para kyai dan memasukkan ke dalam wacana pembelajaran yang inklusif. Dengan demikian, pendekatan pemecahan dapat berangkat dari permasalahan yang mendasar dari pondok terhadap kemajuan ilmu dan pengetahuan, di antaranya adalah memberikan kesetaraan pondok terhadap pendidikan formal. Seperti telah diketahui, bahwa pondok pesantren saat ini telah mampu merangka persepsi kelompok marginal yang berada kelas bawah dan jika reformasi manajemen dapat berubah diprediksi akan mempengaruhi kinerja dan arah pondok.

Pendekatan sosio-kultural dalam penuntasan ini diartikan juga sebagai pendekatan naturalistik, karena pada hakikatnya pondok hadir atas inisiatif masyarakat untuk maju mendalami syariat Islam. Untuk menyasati strategi ini dikembangkan pendekatan naturalistik dengan sentuhan kalbu bahwa. Belajar itu adalah ibadah?

4. Deskripsi Model

Desain model penuntasan waib belajar (PWB) dikdas sembilan tahun bagi anak yang belum/putus sekolah yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah mengacu kepada keempat komponen PWB, yang secara skematis dapat dilukiskan sebagai berikut.



Gambar 1. Model Penuntasan Wajib Belajar Dikdas Sembilan Tahun

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini pada tahun pertama (2007) menggunakan teknik pendekatan penelitian survei dengan didukung metode pengumpulan data melalui angket, *interview*, dan observasi. Penelitian ini bersifat uji coba pengembangan model. Oleh karena itu, data yang terkumpul secara serempak dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Kemajuan pendidikan di Kecamatan Karang Intan masih sangat kurang mengembirakan. Keterlambatan pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini mengakibatkan beberapa desa terpencil seperti Desa Abirau, Pulau Nyiur, Kiram, Bi-ih, Balau, Awang Bangka Timur sangat ketinggalan dibandingkan pendidikan di desa-desa yang lain. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai APK dan APM di desa-desa terpencil tersebut. Desa

Pulau Nyiur yang mempunyai APK SD 88 % APM SD 74 % terdapat sebanyak 128 anak usia 6-15 tahun yang belum menempuh pendidikan baik itu SD maupun SMP. Anak sebanyak itu sampai sekarang belum mendapatkan penanganan yang serius dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan. Upaya yang dirintis melalui kegiatan penelitian ini yaitu melakukan upaya penanganan dengan pendirian dan pemberdayaan sebuah **“SD Filial Swadaya”** yang telah dibuka pada tanggal akhir tahun 2006 dan menerima siswa baru pada tahun ajaran 2007 (Bulan Juli 2007). Keberlangsungan proses belajar mengajar di SD Swadaya ini tentunya juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pendidikan untuk dapat menindak lanjuti atas pendirian lembaga pendidikan tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah SD dan MI sebanyak 32 SD/MI terdiri dari 27 SD Negeri dan 5 MI. Jumlah siswa baru kelas I tahun ajaran 2007 sebanyak 667 anak. Sedangkan jumlah siswa SD dan MI seluruhnya 3.168 anak. Jumlah lulusan SD dan MI tahun 2007 sebanyak 496 anak (71%). Jumlah ruang kelas sebanyak 156 ruang, yang terdiri dari 67 ruang kelas kondisi baik (43%), 33 ruang kelas rusak ringan (21%), dan 56 ruang kelas rusak berat (36%).

Secara keseluruhan jumlah siswa SD lebih banyak jika dibandingkan dengan siswa MI yaitu sebanyak 2.442 siswa SD dan MI sebanyak 429 siswa. Bila dilihat dari status sekolah, jumlah SD negeri lebih banyak jika dibandingkan dengan MI. Sebaliknya jumlah madrasah swasta (Madrasah Diniyah) lebih banyak jika dibandingkan dengan SD sebab dalam setiap kampung hampir terdapat Madrasah Diniyah-nya.

Jumlah SMP yang telah beroperasi sebanyak 4 sekolah, yaitu: (1) SMP Negeri 1 Karang Intan, (2) SMP Negeri 2 Karang Intan, (3) SMP Negeri Satu Atap (SSA) 3 Karang Intan, dan (4) SMP Terbuka Karang Intan. Untuk MTs di wilayah Kecamatan Karang Intan terdapat 5 MTs baik negeri maupun swasta, yaitu: (1) MTs Muhammadiyah Bi-ih, (2) MTs Negeri Karang Intan, (3) MTs Alkhair Mali-Mali, (4) MTs Muhammadiyah Mandi Angin Timur, dan (5) MTs Muhammadiyah Karang Intan.

Selain SMP dan MTs, di wilayah Kecamatan Karang Intan juga terdapat 6 PKBM yang mengelola Kejar Paket B (setara jenjang pendidikan SMP). Dari keenam PKBM pelaksana Kejar Paket B tersebut telah terdapat empat PKBM pengelola Kejar Paket B yang sudah mendapatkan bantuan pendanaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Selain itu, juga terdapat Pondok Pesantren Pendukung Wajar Dikdas Sembilan Tahun khususnya PPS Mifthahussibiyah Induk yang berpusat di Desa Mandi Kapau Timur. Pondok pesantren ini juga telah membuka cabang (unit) di beberapa desa sebagai pelaksana wajar dikdas sembilan tahun, yaitu: (1) Unit PPS Nurul Huda di Desa Sungai Asam, (2) Unit PPS Ta'limul Fatal di Desa Lok Tangga, (3) Unit PPS Mi'rojul Ulum di Desa Mandi Angin, (4) Unit PPS di Desa Kiram Unit PPS di Desa Pandak Daun, (5) Unit PPS di PPS di Desa Awang Bangkal, dan (6) Unit PPS di Desa Sungai Alang dan Sungai Landas.

Selain itu, guna mempercepat penuntasan wajar dikdas sembilan tahun di wilayah Kecamatan Karang Intan, pada saat ini juga telah didirikan dan dibangun 2 unit sekolah baru (USB) yang berupa SD-SMP Satu Atap (SSA) Kiram yang terletak di Desa Kiram yang nantinya akan menjadi SMP Negeri 4 Karang Intan dan SSA Mandi Kapau Barat yang di masa mendatang akan menjadi SMP Negeri 5 Karang Intan.

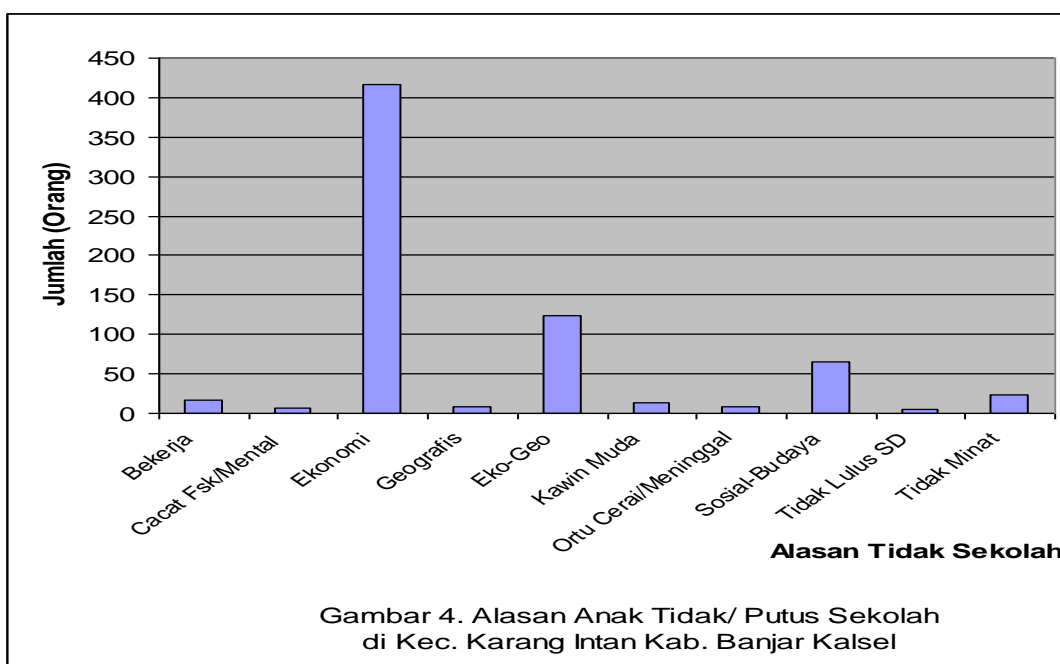
Pondok Pesantren Mifthahussibiyah adalah pondok pesantren yang membuka pendidikan menengah pertama (*Wustho*) setingkat dengan SMP/MTs melalui Program Wajar Dikdas 9 Tahun. Program pendidikan tersebut dibuka pada tahun 2004 dengan membuka tingkat *Wustho* dan Ula. Jumlah siswa usia 13-15 tahun sebanyak 225 anak dan di luar usia 13-15 tahun sebanyak 238 anak. Jumlah siswa di PPS Program wajar dikdas sembilan tahun sebanyak 463 anak dan didukung oleh 43 guru pengajar. PPS Mifthahussibiyah program wajar dikdas sembilan tahun merupakan induk dari beberapa Unit Madrasah/ Tsanawiyah yang mencakup beberapa desa; seperti: Mandi Kapau Timur, Sungai Alang, Sungai Asam, Mandi Angin Barat, Lok Tangga, Awang Bangaka Barat, dan Kiram.

Hasil survei penelitian pada tahun I (2007) ini memperoleh sebanyak 689 anak belum/putus sekolah umur 6-15 tahun di seluruh wilayah

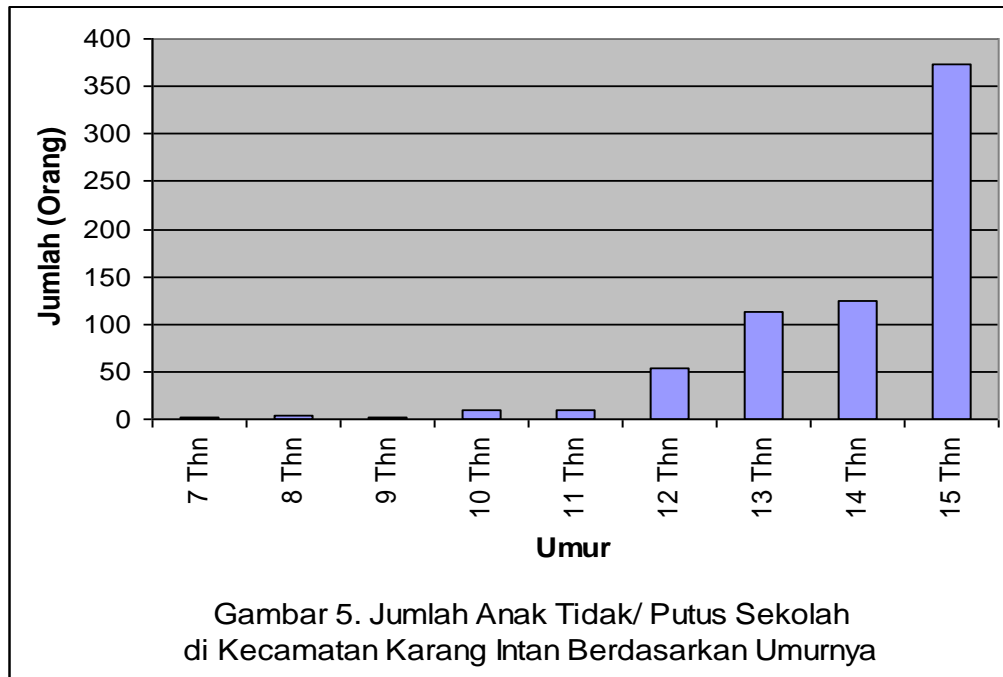
Kecamatan Karang Intan. Alasan mereka tidak bersekolah/putus sekolah sangat bervariasi, yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 10 macam, yaitu karena: (1) bekerja, (2) cacat fisik atau mental, (3) ekonomi, (4) letak geografis, (6) kawin muda, (7) orang tua meninggal/cerai, (8) sosial budaya, (9) tidak lulus SD, dan (10) tidak minat. Jumlah anak yang belum/putus sekolah dan penyebabnya seperti tertuliskan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Penyebab Anak Umur 7-15 Tahun Belum/Putus Sekolah di Wilayah Kecamatan Karang Intan

| No. | Penyebab | Jumlah (Orang) |
|--------|----------------------------|----------------|
| 1 | Bekerja | 17 |
| 2 | Cacat Fisik/ mental | 6 |
| 3 | Ekonomi | 417 |
| 4 | Geografis | 8 |
| 5 | Ekonomi-geografis | 124 |
| 6 | Kawin Muda | 13 |
| 7 | Orang tua cerai/ meninggal | 9 |
| 8 | Sosial-budaya | 66 |
| 9 | Tidak Lulus SD | 5 |
| 10 | Tidak Minat | 24 |
| Jumlah | | 689 |



Jumlah anak tidak/putus sekolah tersebut bila dilihat dari umurnya, sebagaimana yang tergambar pada Gambar 5 berikut ini.



2. Pembahasan

Di wilayah Kecamatan Karang Intan, ditinjau dari potensi sarana dan prasarana pendidikan berkaitan dengan usaha untuk percepatan dan penunjang pelaksanaan program penuntasan wajar dikdas sembilan tahun sampai dengan tahun 2007 tidak ada permasalahan yang berarti. Sebab di wilayah Kecamatan Karang Intan tersebut telah terdapat begitu banyak sarana pendidikan dikdas sembilan tahun baik itu SD, MI, SMP, SSA, MTs, SMP Terbuka baik negeri maupun swasta.

Untuk sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD/MI di seluruh wilayah Kecamatan Karang Intan telah terdapat 32 SD/MI baik itu negeri maupun swasta. Memang dari 26 desa yang termasuk wilayah Kecamatan Karang Intan masih terdapat 4 desa (15,38%) yang tidak memiliki SD/MI, yaitu Desa Lihung, Pasar Lama, Pandak Daun, dan Mandi Angin Barat. Namun bila dilihat letak geografis keempat desa tersebut bukan merupakan wilayah desa yang terpencil dan dengan luas desa yang relatif kecil. Dengan

demikian sangat dimungkinkan para anak yang belum/putus sekolah dapat memasuki SD/MI di desa terdekatnya.

Untuk desa-desa yang mempunyai jumlah penduduk relatif banyak telah terdapat sarana pendukung pendidikan untuk tingkat SD/MI lebih dari satu, seperti: Desa Bi-ih terdapat 2 sekolah (7,69%), Desa Karang Intan terdapat 3 sekolah (11,54%), Desa Sungai Alang (terdapat 2 sekolah (7,69%), Desa Lok Tangga ada 2 sekolah (7,69%), Desa Sungai Arpat ada 2 sekolah (7,69%), Desa Mandi Angin Timur ada 3 sekolah (11,54%), Desa Mandi Kapau Barat ada 2 sekolah (7,69%), dan Desa Penyambaran ada 2 sekolah (7,69%).

Sedangkan desa-desa yaitu Desa Pulau Nyiur, Padang Panjang, Balau, Sungai Asam, Abirau, Mali-mali, Mandi Kapau Timur, Awang Bagkal Timur, Awang Bangkal Barat, Jingah Habang Hulu, Jingah Habang Hilir, Sungai Besar, Kiram, dan Sungai Landas masing-masing hanya terdapat 1 (3,85%) SD/MI sebagai percepatan penuntasan wajar dikdas sembilan tahun di wilayah Kecamatan Karang Intan.

Untuk sarana pendukung pendidikan tingkat lanjutan pertama, pada tahun 2007 ini telah dibangun kembali dua unit SSA baru sebagai pendukung wajar dikdas sembilan tahun yang terletak di Desa Kiram dan Mandi Kapau Barat. SSA Kiram bilamana telah berkembang akan direncanakan menjadi SMP Negeri 4 Karang Intan dan SSA Mandi Kapau Barat akan direncanakan menjadi SMP Negeri 5 Karang Intan. Dengan demikian di seluruh wilayah Kecamatan Karang Intan terdapat 2 SMP Negeri, 3 SSA Negeri, 1 SMP terbuka, dan 5 buah MTs baik negeri maupun swasta. Selain itu, masih terdapat tambahan dukungan sarana percepatan penuntasan wajar dikdas sembilan tahun yaitu berupa PKBM pelaksana Kejar Paket A dan B sebanyak 6 buah dan pondok pesantren Mifthahussibiyah yang berpusat di Desa Mandi Kapau Timur yang telah memiliki cabang unit sebanyak 6 cabang di desa lain.

Dukungan dari pondok pesantren Mifthahussibiyah ini sangat penting artinya sebab 100% penduduk di wilayah Kecamatan Karang Intan adalah beragama islam, sehingga mereka lebih cocok bersekolah di lembaga yang

berbasis agama dibandingkan dengan di sekolah umum. Dengan dukungan dari pondok pesantren ini, dimana para santrinya diajar ilmu-ilmu umum (Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Biologi, dan lain-lain) merupakan sumbangan yang sangat besar artinya dalam penuntasan wajar dikdas sembilan tahun di wilayah penelitian.

Ditinjau dari jumlah anak yang belum/putus sekolah berdasarkan umur dan penyebabnya yang perlu mendapat layanan pendidikan khususnya wajib belajar dikdas sembilan tahun di wilayah Kecamatan Karang Intan memang masih relatif banyak. Secara berturut-turut dari yang paling banyak jumlah penyebabnya mereka belum/putus sekolah adalah karena alasan kondisi ekonomi, letak geografis tempat tinggal, sosial budaya, tidak minat bersekolah, bekerja, kawin muda, orang tua cerai, meninggal, cacat fisik/mental, dan tidak lulus SD. Tiga permasalahan besar yang tampaknya perlu mendapat perhatian dalam rangka usaha percepatan penuntasan wajar dikdas sembilan tahun yaitu permasalahan ekonomi yang berbobot 60,52% dari seluruh anak yang belum/putus sekolah, permasalahan letak geografis tempat tinggal (18,00%) menempati urutan kedua, dan permasalahan sosial budaya (9,58%) menempati urutan ketiga.

Melihat tiga penyebab mereka belum/putus sekolah di atas, alternatif solusi dari tiga permasalahan besar tersebut yaitu: (1) permasalahan ekonomi, dapat diusahakan dengan adanya sekolah gratis dan pemberian bantuan sarana-prasarana sekolah (seragam, buku, tas sekoah, dan lain-lain); (2) permasalahan sosial budaya perlu dilakukan penyuluhan dan kampanye akan arti pentingnya pendidikan sebagai investasi bagi anak di masa yang akan datang; dan (3) alasan letak geografis, tampaknya pada tahun ini sudah dapat teratasi dengan adanya pembangunan unit sekolah baru yang berupa SSA di Desa Kiram dan Desa Mandi Kapau Barat, pemberdayaan PPS pusat di Desa Mandi Kapau Timur dan cabang-cabangnya yang tersebar di enam desa sebagai pelaksana wajar dikdas sembilan tahun, dan peningkatan sarana prasarana pendidikan baik itu sekolah di bawah koordinasi Dinas

Pendidikan maupun Departemen Agama merupakan alternatif solusi yang perlu terus diusahakan perbaikannya.

Dilihat dari penyebarannya berdasarkan kelompok umurnya secara berturut-turut dari yang paling besar dapat dikemukakan yaitu umur 15 Tahun (54,28%), umur 14 tahun (18,00%), umur 13 tahun (16,26%), umur 12 tahun (7,84%), umur 11 tahun (1,45%), umur 10 tahun (1,31%), umur 9 tahun (0,15%), umur 8 tahun (0,44%), dan 7 tahun (0,29%). Jumlah anak yang belum/putus sekolah tersebut jika dikelompokkan menjadi anak usia SD/MI (usia 6-12 tahun) dan SMP/MTs (usia 13-15 tahun), secara kuantitatif yaitu belum/putus usia SD/MI dan yang sederajat sebanyak 79 orang (11,47%) dan belum/putus usia SMP/MTs dan yang sederajat sebanyak 610 orang (88,53%)

Melihat jumlah anak yang belum/putus sekolah tingkat pendidikan SMP/MTs dan sederajat yang persentasenya besar dan dengan mempertimbangkan budaya setempat, tampaknya peran pondok pesantren sebagai pelaksana program wajar dikdas sembilan tahun menjadi lebih penting. Hal ini berdasarkan hasil survei tahun pertama (2007), menunjukkan bahwa mereka malu bilaman harus bersekolah di pendidikan formal. Mereka lebih memilih belajar di lembaga pendidikan yang berbasis agama seperti pondok pesantren atau bergabung di PKBM terdekat yang menyelenggarakan Kejar Paket B (setara SMP). Oleh sebab itu, peran pondok pesantren dan PKBM akan emnajdi lebih penting dalam membantu mendukung suksesnya program wajar dikdas sembilan tahun di wilayah penelitian ini (wilayah Kecamatan Karang Intan).

Untuk anak-anak yang belum/putus sekolah usia SD/MI dan yang sederajat yang jumlahnya 79 anak (11,47%), mereka dapat memasuki sekolah formal (SD/MI dan lain-lain) seperti masuk di SD Filial (Swadaya Masyarakat) di Batu Tiris tentunya untuk lokasi desa yang terdekat. Namun apabila mereka juga berkeberatan seperti hal untuk anak yang usia SMP, maka alternatif solusinya juga sama seperti halnya anak usia sekolah lanjutan pertama yang belum/putus sekolah yaitu

memasuki pondok pesantren pelaksana program wajar dikdas sembilan tahun atau PKBM penyelenggara Kejar Pake A (setara SD/MI). Oleh sebab itu keberadaan pondok pesantren khususnya PPS Mifthaussibiyah dan PKBM di wilayah Kecamatan Karang Intan ini akan semakin penting. Hal ini dikarenakan, ada kecenderungan (*trend*) usia putus sekolah yang paling besar adalah bilamana mereka lulus dari SD/MI (peralihan dari SD/MI ke SMP/MTs dan yang sederajat).

Hal tersebut di atas juga untuk mengantisipasi para lulusan SD/MI di masa-masa yang akan datang yang kecenderungan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi (SMP/MTs). Mereka dapat diarahkan untuk mengikuti pendidikan non formal yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai wujud kesinergisan program percepatan penuntasan wajar dikdas sembilan tahun dengan potensi masyarakat setempat. Dengan demikian lambat laun akan tumbuh budaya dan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat akan arti pentingnya pendidikan bagi anak sebagai investasi peningkatan kualitas SDM untuk peningkatan kesejahteraan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan tiga permasalahan utama dalam penelitian tahun pertama (2007) ini selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Ditinjau dari potensi sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Karang Intan tidak ada permasalahan yang berarti. Sebab di wilayah Kecamatan Karang Intan sampai dengan tahun 2007 ini telah terdapat 32 SD/MI negeri/swasta, 2 SMP Negeri, 3 SSA, 1 SMP Terbuka, 6 PKBM Penyelenggara Kejar Paket A dan B, 1 PPs Pusat, dan 6 Unit PPS yang tersebar di 6 desa sebagai penyelenggara program wajar dikdas sembilan tahun.
- b. Ditinjau dari jumlah anak yang belum/putus sekolah berdasarkan umur dan penyebabnya memang masih relatif banyak jumlahnya yaitu

sebanyak 689 anak. Tiga penyebab utama mereka belum/putus sekolah secara berturut-turut adalah permasalahan ekonomi (60,52%), permasalahan letak geografis tempat tinggal (18,00%), dan permasalahan sosial budaya (9,58%).

- c. Ditinjau dari penyebaran anak yang belum/putus sekolah secara berturut-turut dari umur yang paling tua yaitu: 15 tahun (54,28%), 14 tahun (18,00%), 13 tahun (16,26%), 12 tahun (7,84%), 11 tahun (1,45%), 10 tahun (1,31%), 9 tahun (0,15%), 8 tahun (0,44%), dan 7 tahun (0,29%). Melihat nilai persentase ini tampak dengan jelas ada kecenderungan anak setelah lulus dari SD/MI tidak melanjutkan ke SMP/MTs dan yang sederajat.

Hasil dari kegiatan penelitian tahun I (2007) ini baru merupakan langkah awal dari semua penerapan Disain Model Penelitian yang dirancang, penelitian tindakan lapangan (*action reseach*) akan dilaksanakan pada tahun kedua (2008) mendatang guna melihat efektivitas model penelitian yang telah dirumuskan. Tolok ukur yang akan dijadikan pedoman dalam evaluasi odel yang diterapkan yaitu dengan melihat APK dan APM sebagai indikator utamanya. Sebagai indikator pendukung yaitu APS, Alus, Anjut, dan AM.

2. Saran-saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan terkait dengan hasil penelitian tahun pertama ini yaitu: (1) permasalahan ekonomi, alternatif solusi yang dapat berupa sekolah gratis dan pemberian bantuan sarana prasarana sekolah. (2) Permasalahan sosial dan budaya, perlu dilakukan penyuluhan dan kampanye. (3) Pemberdayaan PPS dan PKBM dengan penyediaan fasilitas bagi guru/pendidik/tutor dan pembiayaan operasional pendidikan di lembaga pendidikan non formal tersebut selayaknya dilakukan sebab sebagian besar anak yang tidak/putus sekolah adalah telah berumur 12-15 tahun yang pada umumnya mereka tidak bersedia bersekolah di lembaga pendidikan formal. (4) Hasil penelitian tahun pertama (2007) baru merupakan langkah awal dari

penerapan model penelitian yang direncanakan. Oleh sebab itu, agar memperoleh model yang utuh dan melihat sejauhmana efektivitas model yang ditawarkan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian pada tahun kedua (2008) sebagai penelitian tindakan lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Coombs, PH. (1973). **New Part to Learning for Rural Children and Youth: Non Formal Education for Rural Development**. New York: IECD.
- Depag. (2004). **Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah**. Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI.
- Depdiknas. (2006). **Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas.
- _____. (2006). **Informasi Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas.
- _____. (2006a). **Panduan Pembekalan Calon Peserta KKN Wajib Belajar Sembilan Tahun**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. (2006b). **Informasi Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. (2006c). **Panduan Pendataan dan Pemetaan dalam Rangka Menunjang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. (2006d). **Panduan Pemilihan Pola/Satuan Pendidikan dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. (2006e). **Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.

- Hajar Pamadhi. (2005). **Penuntasan Wajar 9 Tahun pendidikan Dasar di Pondok Pesantren (Suatu Kajian Politis-Kultural)**. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depar-temen Pendidikan Nasional.
- Ivan Illich. (1982). **Bebas Dari Sekolah. Terjemahan oleh C. Woekirsari**. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kerlinger, Fred N. (1986). **Foundation of Behavioral Research**. Third Edition Holt, Rinehart & Winston.
- Karim dan Saleh Sugiyanto. (1976). **Menampung Anak Usia Sekolah: Antara Target dan Kemampuan**, "Prisma" No. 2 Th. V. Jakarta: LP3S.
- Kartini Kartono. (1990). **Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)**. Bandung: Mandar Maju.
- Monks, Knoer dan St. R. Haditono. (1999). **Psikologi Perkembangan**. Yogya-karta: Gadjah Mada University Press.
- Muller, Johanes. (1980). **Pendidikan Sebagai Jalan Pembebasan dari Cengkeraman Kemelaratan**. Prisma No. 7 Th. IX. Jakarta. LP3S.
- Mubyarto. (1991). **Etos Kerja dan Kohesi Sosial**. Yogyakarta: Aditya Media.
- Richard Beckhard, (1987). **The Program for Specialis in Organization Training and Development Institute**. Insititute for Applied Behaviour Science.
- Spradley, James P. (1980). **Participant Observation**. USA Holt Reinhart and Winston.